

PACITAN DALAM PEMBANGUNAN MASA BUPATI SUTJIPTO TAHUN 1998 – 2000: SUATU TINJAUAN HISTORIS PERATURAN DAERAH

Nurul Hidayat¹ & Heru Arif Pianto²

*¹Pemerhati Sejarah Pacitan & ²Dosen Pada Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pacitan
nurul05031996@gmail.com & ariefheru84@gmail.com*

Naskah diterima: 10/11/21, Naskah direvisi: 20/11/21, Naskah disetujui: 03/12/21

ABSTRACT

This study aims to determine the history of government and bureaucracy after the fall of President Soeharto's government which was arranged during the crisis. The history of the government in question is the government in Pacitan Regency which at that time coincided with the reign of the Sutjipto Regent. At that time, almost all regions throughout the archipelago felt the impact, especially in the field of development. The research uses the historical method by reconstructing the past through a process of critical testing and analysis of the records and relics of the past. Broadly speaking, historical research includes four steps, starting from heuristics (collection of sources), criticism (verification), interpretation (imagination based on facts), and historiography (arranging facts chronologically). During the reign of Regent Sutjipto, in the period 1998-2000 he carried out a five-year development plan which was approved by the previous government through Perda no. 1 1994 concerning Basic Patterns of Pacitan Level II Regional Development 1994/1995 – 1998/1999. With a focus on the development of human and economic resources. Even with the crisis situation, Pacitan was able to adapt and the results were based on the Susenas survey with several indicators, Pacitan experienced an increase in population and population growth, sex ratio, number of households, and population density.

Keywords: *Pacitan, Government and Bureaucracy, Region Regulation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pemerintahan serta birokrasi setelah turunnya pemerintahan Presiden Soeharto yang disusun masa krisis. Sejarah pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan di Kabupaten Pacitan yang saat itu bertepatan dengan masa pemerintahan Bupati Sutjipto. Pada saat itu hampir semua wilayah di seluruh Nusantara merasakan dampak khususnya dibidang pembangunan. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan cara merekonstruksi masa lampau melalui proses pengujian dan analisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. Secara garis besar penelitian sejarah meliputi empat langkah mulai dari heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi), interpretasi (imajinasi berdasarkan fakta), dan historiografi (merangkai fakta secara kronologis). Masa Pemerintahan Bupati Sutjipto, dalam kurun tahun 1998-2000 menjalankan rencana pembangunan lima tahunan yang telah disahkan oleh pemerintahan sebelumnya melalui Perda No. 1 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1994/1995 – 1998/1999. Dengan titik fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi. Meskipun dengan situasi krisis, Pacitan mampu beradaptasi dan hasilnya berdasarkan survei Susenas dengan beberapa indikator, Pacitan mengalami peningkatan jumlah dan pertumbuhan penduduk, sex ratio, jumlah rumah tangga, dan kepadatan penduduk.

Kata kunci: *Pacitan, Pemerintahan dan Birokrasi, Peraturan Daerah.*

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 menuntut adanya perubahan kehidupan politik dan pemerintahan menuju arah yang lebih demokratis. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi sistem pergantian kekuasaan yang teratur, bersih, dan tanpa kekerasan.¹ Salah satu yang ikut dalam memperjuangkan reformasi ialah mahasiswa dan tokoh-tokoh intelektual yang menginginkan demokrasi dijalankan dengan konsep transparansi baik dalam pemerintahan maupun birokrasi.

Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Terletak di Pesisir Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Pacitan dikaruniai pantai-pantai yang indah. Meskipun memiliki pesisir yang luas, sebagian besar masyarakat Pacitan hidup pada sektor pertanian. Kondisi alam Pacitan yang demikian secara geografis tentu dalam ranah reformasi tidak terlalu terdampak dalam naiknya suhu politik seperti di Jakarta.

Jika dilihat dari kondisi dan tata letak Pacitan yang demikian namun, dengan berkembangnya teknologi dan maraknya informasi yang berkembang patut jika Pacitan digali, bagaimana respon pemerintah Pacitan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melakukan kebijakan otonomi daerah. Kaitannya dengan hal tersebut peneliti ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana jalannya roda pemerintahan di Pacitan. Adanya otonomi daerah membuat Pacitan harus menentukan formulasi yang tepat untuk menjaga iklim demokrasi dan keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan. Tahun 1998 ditandai dengan reformasi secara nasional dan tahun 2011 ialah masa perkembangan Pacitan setelah dipimpin oleh dua kepemimpinan yang dilaksanakan setelah bergulirnya reformasi dengan dua sistem pemilihan umum yang berbeda.

Setelah adanya perluasan pada Undang-undang otonomi daerah pasca reformasi dengan diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah meluaskan peranan daerah dalam mengelola rumah tangga pemerintahan. Pemerintahan pada masa orde baru cenderung kurang leluasa untuk menentukan kebijakan karena struktur birokrasi yang kurang mendukung, tetapi pasca reformasi banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam upaya mengorganisir pemerintahan maupun pembangunan yang ada di daerah. Pemerintah Daerah bersama DPRD ialah kesatuan dalam pemerintahan yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif untuk saling mendukung dan mengawasi dalam pemerintahan maupun pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh kepala daerah. Berbeda dengan masa orde baru, pemerintah daerah menjabarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun MPR dan pemerintah sebagai mandataris MPR, yang sampai di Daerah Tingkat I dan II dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan daerah baik jangka menengah lima tahunan (RPJM) maupun rencana kerja daerah dalam satu tahun (RKP).

METODE

¹ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Arah Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 44.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah, yaitu cara merekonstruksikan masa lampau melalui proses pengujian dan analisa secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lalu.² Sedangkan penelitian sejarah secara umum mempunyai empat langkah yang meliputi; heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi serta tahapan penyajian.³ Sumber-sumber sejarah yang digunakan adalah berupa sumber primer dan sekunder baik berupa buku-buku, majalah serta cetakan atau laporan.

Metode penelitian pertama yang dilakukan adalah heuristik. Pengertian dari istilah heuristik sendiri adalah kemampuan dalam menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Sedangkan prinsip yang harus dilakukan adalah tahap pencarian sumber primer. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan sumber arsip dokumentasi kegiatan serta yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melakukan wawancara.

Langkah kedua adalah melakukan kritik sumber. Pada langkah ini dilakukan penilaian, pengujian serta penyeleksian jejak-jejak atau sumber-sumber yang telah di kumpulkan. Tahap kritik ini dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern.⁴ Dalam penelitian ini kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian dari sumber sejarah yang berhasil di kumpulkan, sedangkan kritik intern digunakan untuk mengkaji kredibilitas sumber.

Langkah ketiga yang dilakukan adalah Interpretasi. Berbagai sumber itu belum bermakna apabila belum dilakukan interpretasi yang meliputi analisis dan sintesis.⁵ Kemudian sumber-sumber yang telah dinyatakan lolos dalam kritik ekstern dan intern tadi disintesis. Dalam tahap ini sudah bisa ditentukan makna dan hubungan fakta-fakta yang bersifat kausalitas atau saling berkaitan serta kronologis. Metode interpretasi sejarah sering diarahkan kepada pandangan ahli filsafat, sehingga sejarawan bias mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis.

Langkah terakhir adalah historiografi sejarah. Tahap ini merupakan tahap akhir penulisan atau rekonstruksi peristiwa masa lampau dalam bentuk kisah sejarah yang dituangkan ke dalam tulisan.⁶ Ketika dalam tahapan penulisan ini memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu ceritanya seperti serialisasi, kronologi, kausalitas dan imajinasi.⁷ Penulisan hasil penelitian sejarah dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir. Dengan demikian dapat diketahui apakah penelitian itu dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak, serta dapat diketahui sejauh mana validitas dari sumber-sumber yang didapatkan. Selain itu dalam tahapan ini dapat kita lihat menarik atau tidaknya hasil karya dari sejarawan yang bersangkutan, karena dalam

² Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1983) hlm. 18-32.

³ Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm. 147-151.

⁴ I.G.Widja, *Pengantar Ilmu Sejarah, Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*, (Semarang: SatyaWacana, 1998) hlm. 21-22

⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng 1999) hlm. 100-102.

⁶ SartonoKartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: sebuah alternatif*. (Jakarta: Gramedia, 1982) hlm. 60-61.

⁷ I.G. Widja, *op. cit.*, hlm. 24.

penulisnya juga harus pandai dalam mengolah serta menyusun kalimat-kalimat yang menarik akan tetapi tidak menghilangkan mutu dari cerita sejarah yang ditulis. Dalam makalah ini penulis menyajikan dalam bentuk cerita sejarah yang di tulis secara kronologis dari tema atau topik yang jelas serta mudah di pahami.

PEMBAHASAN

Pemerintahan Bupati Sutjipto di Pacitan

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) melakukan survei pada penduduk di Kabupaten Pacitan pada Tahun 1998 dan 1999. Berdasarkan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pacitan Tahun 1999 dari beberapa Indikator menunjukkan adanya peningkatan.⁸

Tabel 2.1.

Ciri-ciri Penduduk di Kabupaten Pacitan Tahun 1998 dan 1999

Rincian	Tahun	
	1998	1999
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk	509.250	510.193
a. Laki-laki	243.729	251.005
b. Perempuan	265.521	259.188
Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	91,79 %	96,84 %
Jumlah Rumah Tangga	144.448	146.528
Pertumbuhan Penduduk	0,50 %	0,19
Kepadatan/Km2	379	380

Sumber: Susenas 1998 dan 1999.

Hasil dari Susenas tahun 1998 penduduk Kabupaten Pacitan berjumlah 509.250 jiwa. Terdiri dari 52.14 % atau 265.521 jiwa penduduk perempuan dan penduduk laki-laki sebesar 47,86 % atau 248.79 jiwa. Dengan demikian angka pertumbuhan penduduk pada tahun 1998-1999 sebesar 0,19 %. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan tahun 1997-1998 yang pertumbuhan penduduknya mencapai 0,50 %.

Kepadatan penduduk merupakan salah satu dampak dari selalu bertambahnya jumlah penduduk di suatu tempat. Kabupaten Pacitan dengan luas wilayah 1.342, 42 Km² pada tahun 1999 mempunyai kepadatan penduduk 380 jiwa/Km². Jika dibandingkan dengan hasil Susenas tahun 1998, Pacitan mempunyai kepadatan penduduk 379 jiwa/Km². Jadi, telah terjadi peningkatan rata-rata 1 jiwa/Km². Dan akan semakin bertambah pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan banyak pasangan muda melahirkan anak.⁹ Menurut hasil survei Susenas 1999 Kabupaten Pacitan berpenduduk 510.193 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 50,80 % atau 259.188 orang adalah penduduk perempuan dan sebesar 49,20 % adalah penduduk laki-laki. Jumlah antara penduduk laki-laki dan perempuan tersebut hampir seimbang dengan selisih 8.183 jiwa atau 1,60 %.

Letnan Kolonel (Letkol) Sutjipto HS adalah Bupati Pacitan terakhir pada masa Orde Baru sekaligus Bupati pamungkas dari kalangan militer. Bupati Sutjipto

⁸ Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkestra) merupakan salah satu tolok ukur untuk mengevaluasi suatu keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

⁹ Lihat Buku Pacitan Dalam Angka 2000-2011.

menjabat mulai tahun 1995 sampai tahun 2000.¹⁰ Di antara tahun itu Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang melahirkan masa transisi, yakni saat Orde baru tumbang dan berganti Orde Reformasi. Situasi krisis politik nasional tidak begitu terasa gejolaknya di Pacitan, tetap saja eksisnya sampai pada perubahan konstalasi politik lokal. Sutjipto memimpin Pacitan dalam situasi transisi. Dari dominasi militer atas kekuasaan sipil ke situasi reformasi yang masih penuh *euforia*.

Masa pemerintahan Bupati Sutjipto tidak lepas dari rencana pembangunan yang telah dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Rencana pembangunan lima tahunan sudah disahkan oleh Bupati Soedjito bersama dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Pacitan. Rencana pembangunan lima tahunan tersebut untuk pembangunan dari 1994/1995 – 1998/1999.¹¹

Sasaran umum pembangunan adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan lahir batin.¹²

Bidang ekonomi menjadi titik yang memberatkan dan merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang. Maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Pacitan 1994/1995–1998/1999 adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah tersebut diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah. Dengan Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pengarahan dan bimbingan serta mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan. Program pelaksanaan kebijaksanaan dan usaha pembangunan setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang pembiayaannya dibiayai menggunakan APBN, APBD tingkat I dan APBD tingkat II, investasi swasta dan swadaya masyarakat.

Situasi nasional telah berganti kekuasaan dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden setelah pencalonan oleh Partai Golkar yang ke tujuh kalinya, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 tepat pukul 09.00 di Istana Merdeka, Mahkamah Agung melantik B J Habibie sebagai Presiden sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Pasal 8 yang berbunyi “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”.

Pacitan dalam pemerintahan Sutjipto pada tahun 1998 dengan situasi nasional yang mengalami pergolakan akibat krisis, demonstrasi di berbagai daerah dan pergantian kekuasaan, ternyata bisa menyesuaikan diri. Hal itu terlihat dengan produktifnya Pemerintah Kabupaten bersama DPRD membuat Peraturan Daerah

¹⁰ Masa pemerintahan diketahui dari Peraturan Daerah yang telah ditandatangani Bupati dan DPRD Pacitan kurun 1995-2000.

¹¹ Lihat juga Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1994/1995 – 1998/1999.

¹² Buku Pola Dasar Pemabangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1994/1995–1998/1999, berisi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1994 beserta uraian pembangunannya. Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan. Hlm. 38.

(Perda). Ada 23 Perda yang dibentuk untuk dalam kurun 1998. Dalam menghadapi krisis dibentuk enam Perda untuk menambah pemasukan daerah di tengah situasi perekonomian nasional yang kurang stabil.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Bahan galian yang dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi meliputi Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah Permata, Batu Kapur, Batu Apung, Batu Permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam Batu (Halite), Grafit, Granit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa, Perlit, Phospat, Talk, Tanah Serap, Tanah Diaome, Tanah Liat, Tawas (alum), Tras, Yarosif, Zeolit, Andesit.¹³ Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan dipungut di Wilayah Daerah.¹⁴

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah. Besarnya retribusi yang harus dibayarkan ditetapkan berdasarkan jenis barang/jasa dan banyaknya. Untuk menaruh atau menyimpan barang dagangan atau tanggungan pemilik didalam pasar selama 1 (satu) malam atau bagiannya dikenakan retribusi sebesar Rp. 100 (seratus rupiah setiap m². Untuk berdagang kelapa, kopra, gula di pasar Daerah, tiap 1 (satu) butir atau buah dikenakan retribusi Rp. 2 (dua rupiah). Menggunakan los-los dalam pasar untuk berjualan dikenakan retribusi harian, tiap m² sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 6 (enam) m². Menggunakan tempat untuk berjualan diluar atau sekitar bangunan los dalam pasar dengan ketentuan dengan tidak boleh lebih dari 5 (lima) m² dikenakan retribusi harian.

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan. Tarif pajak ditetapkan untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen). Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen). Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen).¹⁵

Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. Pajak Reklame sebagaimana dimaksud yaitu Reklame Papan/Bilboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame merekat (stiker), Reklame Selebaran, Reklame Berjalan; termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame Suara, Reklame Film/slide, dan Reklame Peragaan.¹⁶ Pajak yang dikecualikan adalah penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta harian. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan dari orang atau badan yang menempati tanah dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m², dan penyelenggaraan reklame suara yang penyelenggaraannya termasuk golongan

¹³ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

penjaja atau pengusaha kecil.¹⁷ Besaran tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Pajak hiburan sebagai mana yang dimaksud antara lain Pertunjukan Film, Pertunjukan kesenian dan sejenisnya, Pagelaran musik dan tari, Karaoke, Permainan Bilyard, Permainan Ketangkasan, dan Pertandingan olahraga.¹⁸

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Objek pajak sebagaimana yang dimaksud meliputi, fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximile*, *telex*, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain Pusat Kebugaran (*fitnes center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. Jasa persewaan mangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.¹⁹

Objek pajak yang dikecualikan adalah penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel. Asrama dan pesantren. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai umum oleh di hotel. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum, dan pelayanan jasa boga/katering.²⁰

Tabel 2.2.
Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 1999

Sektor	L	P	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	135.808	102.258	238.066	73,03
Pertambangan	702	234	936	0,29
Industri	8.190	13.104	21.294	6,71
Listrik	98	-	98	0,03
Bangunan	8.556	234	8.790	2,77
Perdagangan	16.128	22.538	38.666	12,19
Komunikasi	3.781	234	4.015	1,27
Keuangan	139	208	347	0,11
Jasa	11.215	13.858	15.073	4,75

Sumber: Susenas 1999.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

¹⁹ Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

²⁰ *Ibid.*

Sektor pertanian menjadi sebagian besar pekerjaan utama masyarakat Pacitan dengan persentase 73,03 %, disusul sektor perdagangan dengan persentase 12,19 %. Angkatan kerja pada sektor pertanian laki-laki dengan persentase 57,05 % dan perempuan 42,95 %. Berkembangnya sektor industri tentu akan membuat pengusaha memacu produksinya, sehingga akan meramaikan permintaan pasar. Dengan demikian akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja banyak. Angkatan kerja pada beberapa sektor seperti industri, perdagangan, keuangan, dan jasa lebih banyak didominasi oleh perempuan.

Dampak Reformasi 1998 Terhadap Kondisi Politik di Pacitan

Krisis moneter menjadi awal keterpurukan Indonesia dan Presiden Soeharto yang saat itu berpangkat Jenderal Besar Kehormatan (bintang lima) meminta bantuan dana *International Monetary Fund* (IMF) sebesar US \$43 miliar.²¹ Pemerintahan-pemerintahan pasca Soeharto justru membiarkan arah perekonomian nasional terperangkap arus globalisasi yang dikendalikan rezim ekonomi neo-liberal (masa liberal baru) yang dipelopori Amerika Serikat dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF).²²

Situasi krisis yang semakin mendalam, gangguan sosial pun terjadi terutama dalam awal tahun 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan-kerusuhan anti Cina. Karena situasi perekonomian dikuasai oleh etnis Cina. Gejolak tidak hanya pada situasi ekonomi, aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapat tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa diberbagai kota lainnya mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus.²³ Berbeda halnya tentang yang terjadi di Pacitan, kondisi kemelut yang terjadi pada lingkup nasional praktis tidak dirasakan masyarakat.

Pemilu 1999, tercatat bahwa penduduk Pacitan adalah 522.000 jiwa dengan 1 kursi perwakilan di DPR Pusat dan 1 perwakilan di DPRD Provinsi. Pada tingkat DPRD Kabupaten, Pacitan memiliki 45 kursi yang terdiri dari 40 anggota terpilih dan 5 dari ABRI.²⁴ ABRI masa itu masih diperbolehkan menduduki kursi parlemen sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu menjalankan Dwifungsi ABRI. Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan masa Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki tugas ganda, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota DPR serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD

²¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) hlm 665.

²² Syamsuddin Haris, *Masalah-masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2014) hlm 64. Tentang hal ini, mendapat referensi dari Joseph E. Stiliglits, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional*, Jakarta: PT Ina Republikatama, 2003.

²³ Marwati. *Op. Cit.*, hlm 667.

²⁴ Berdasar pada Buku Pemilu 1999 dalam Angka oleh Komisi Pemilihan Umum (pusat), hlm 51.

Kabupaten/Kota seindonesia periode 1999-2004. Pemilihan Umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru.

Pemilihan Umum ini diikuti oleh 48 partai politik, yang mencakup semua arah dan idiologi masing-masing partai politik (kecuali partai komunis dan yang beraliran komunisme). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional sampai tingkat daerah. Pemilihan Umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintah waktu itu.

Empat besar perolehan suara tertinggi yang berhasil mendapat suara di Pacitan yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 96.861 suara, Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 80.075 suara, Partai Kebangkitan Bangsa dengan 41.895 suara, dan Partai Amanat Nasional dengan 11.961 suara.²⁵ Partai yang pada Orde Baru selalu mengalami keunggulan pada Pemilu 1999 mulai tergantikan dengan Partai dengan idiologi nasionalis. Partai dengan idiologi keagamaan masih mempertahankan konstituennya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) posisi tiga, Partai Amanat Nasional (PAN) berada di posisi empat besar dan menyusul Partai Persatuan Pembangunan diposisi lima. PKB, PAN yang merupakan partai baru, meraih posisi yang terbilang menguntungkan. Partai Persatuan Pembangunan yang pada masa Orde Baru sebagai partai dengan basis agama, di Pemilu 1999 harus berbagi pemilih dengan idiologi keagamaan dengan PAN dan PKB.

Pemilu 1999 telah menghasilkan formasi baru dalam pemerintahan parlemen di Daerah Tingkat II. Partai dengan basis nasionalisme (PDI-P) menduduki kursi pemerintahan dengan porsi yang lebih banyak. Karena secara persentase, anggota dipilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak. Meskipun sudah mengalami reformasi, namun Fraksi TNI/Polri masih ikut dalam pemerintahan parlemen. Karena regulasi masa itu masih memperbolehkan Fraksi dari TNI/Polri mengawal jalannya pemerintahan.

Fraksi PDI-P berhasil menjadi partai teratas dengan perolehan 15 kursi diketuai Drs. Sugeng Joko Purnomo dan sekretaris Faisal Arif, Golkar dengan 12 kursi diketuai Suprpto dan sekretaris Drs. HM Syamsuri, PKB dengan 7 kursi diketuai Lukman Al Hakim dan sekretaris Sifaul Djanan, Fraksi Gabungan dengan 6 kursi diketuai Agus Sadianto dan sekretaris Saptono Nugroho, Fraksi TNI/Polri dengan 5 kursi diketuai Suhadi dan sekretaris Sungkono. Jumlah kursi di DPRD Kabupaten adalah 45 dengan terdiri dari 42 laki-laki dan 3 perempuan.

Tabel 2.3.

Susunan Bidang Tugas DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilu Tahun 1999

Nama Fraksi	Nama Ketua Komisi	Nama Sekretaris Komisi	Bidang Tugas Komisi
(1)	(2)	(3)	(4)

²⁵ Pemilu 1999 Dalam Angka.

KOMISI A	Sumaryadi	Soejono, AS	Pemerintahan
KOMISI B	Narto	Heru Suwarna	Perekonomian
KOMISI C	Soeprapto	MZ Wicaksono	Keuangan
KOMISI D	Hariawan, ST	Drs. Ahmad Sunhaji	Pembangunan
KOMISI E	Drs. HM Syamsuri	Suharto	Kesra

Sumber: Pacitan Dalam Angka 1999.

Masa pemerintahan Bupati Sutjipto berakhir pada Maret 2000.²⁶ Pada tahun 2000 Sutjipto mencalonkan kembali sebagai Bupati, namun tidak terpilih oleh DPRD. Sutrisno terpilih menggantikan Bupati Sutjipto untuk masa jabatan 2000-2005.

SIMPULAN

Masa Pemerintahan Bupati Sutjipto tidak terdapat Peraturan Daerah mengenai penataan atau pengorganisasi dalam pemerintahan di wilayah kerja Kabupaten Pacitan. Dalam kurun tahun 1998-2000 tidak didapati Perda yang mengatur tentang tata pemerintahan, baik Tingkat Daerah maupun Desa. Hal tersebut dikarenakan regulasi belum memberi kewenangan pada pemerintah daerah tingkat II kabupaten untuk melakukan perubahan atau mengorganisir pemerintahan daerah secara leluasa. Ketergantungan pada pemerintah pusat pada pemberlakuan arah eksplor pada potensi daerah juga kurang maksimal baik pembangunan maupun secara regulasi. Baru setelah Pemerintahan hasil Pemilu 1999, Pemerintahan Daerah menata struktur birokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan arah kebijakan daerah. Penyesuaian struktur birokrasi pada Pemerintah Daerah masa Orde Baru didasarkan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang menjadi fokus pembangunan pemerintah.

Pengangkatan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme Parlemen yaitu DPRD melakukan sidang pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang calon yang telah disepakati dan dimusyawarahkan bersama antara DPRD/Pimpinan Fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah.²⁷ Selanjutnya calon dipilih dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Dan untuk Daerah Tingkat I Provinsi dilantik oleh Presiden.

²⁶ Berakhirnya masa pemerintahan Sutjipto didasarkan pada beberapa Peraturan Daerah Yang ditandatangani pada Bulan Maret Tahun 2000.

²⁷ Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Gaffar, A. *Politik Indonesia Transisi Menuju Arah Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press. 2008.
- Komisi Pemilihan Umum. *Pemilu 1999 dalam Angka oleh Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU. 1999.
- , *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Dati II Pacitan*. Pacitan: BAPPEDA dan BPS Pacitan. 1999.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010
- Sugeng Priyadi. 2015. *Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Syamsuddin Haris. 2014. *Masalah-masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor.

DOKUMEN:

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pacitan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pacitan Tahun 2006.
- Pemerintah Daerah Pacitan. *Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1994/1995 – 1998/1999*. Pacitan: Pemda Pacitan. 1994.